

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2006). *Pengantar Ilmu HTN Jilid II*. Jakarta: Konpres.
- _____. (2010). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bawaslu. (2023). *Awasi Tahapan Pemutakhiran Pemilih*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/awasi-tahapan-pemutakhiran-data-pemilih-lolly-daftar-pemilih-harus-akurat-dan-benar>.
- Bawaslu Kabupaten Blitar. (2023). *Struktur Organisasi*, <https://blitar.bawaslu.go.id/struktur-organisasi>.
- _____. (2024). *Visi dan Misi*. <https://blitar.bawaslu.go.id/visi-misi-bawaslu>.
- Boristamp. "Imigrasi Indonesia: Syarat Orang Asing Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia. (2017) <https://www.kaskus.co.id/thread/590bfe0b1cbfaa68088b456d/imigrasi-indonesia-syarat-orang-asing-masuk-dan-keluar-wilayah-indonesia/>.
- Bawaslu Kaltara, "Sentra Gakumdu, Interkoneksi Lembaga dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu". <https://kaltara.bawaslu.go.id/sentra-gakkumdu-interkoneksi-lembaga-dalam-penanganan-tindak-pidana-pemilu/>.
- Radjab, Dasril. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Jonaedi., Ibrahim., & Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fauzi, Moch. Salim Fikra., & Wahyono, Eko. (2021). "*Peran badan pengawas pemilihan umum dalam Penegakan hukum pelaksanaan pemilihan umum DPRD Kota Probolinggo*".
- Hasil wawancara dengan Bapak Jaka Wandira, S.Sos, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar.
- Huda, Ni'matul., & Nasef, M. Imam. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Marwan, SM., & Jimmy, P. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Tim Penyusun.(2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024.
- Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009.

Putusan MK No.20/PUU-XVII/2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Masa Izin Kitas.

Pemerintah kabupaten Blitar. (2021). *Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Blitar*. <https://www.blitarkab.go.id/kondisi-umum-wilayah-kabupaten-blitar/>

HR, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Saleh. (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

Siyoto, Sandu., M. Kes., & Ali Sodik., Ayup (ed.). (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sholahuddin, A. H., dkk. (2023). *Hukum Pemilu Indonesia*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.

Tutik, Titik Triwulan. (2008). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cerdas Pustaka.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Zainal, Arifin., & Arifudin. (2017). *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.